

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mewabahnya virus Covid-19 sejak tahun 2020 sejatinya membuat banyak negara turut melakukan upaya kerja sama internasionalnya. Tidak terkecuali Indonesia, bagaimana pemerintah Indonesia telah mewujudkan berbagai kebijakan di masa pandemi ini. Salah satunya ialah, dengan membuat kebijakan diplomasi vaksin. Dimana dalam hal ini pemerintah Indonesia mempunyai tujuan untuk memberikan akses kesehatan yang memadai bagi seluruh warga negaranya. Hal ini tentunya meliputi berbagai aspek seperti, menjamin adanya ketersediaan vaksin, dan obat-obatan. Terlebih, diplomasi vaksin yang saat ini tengah dijalankan oleh pemerintah Indonesia nyatanya juga menjadi prioritas utama dalam upaya membangun sebuah kerja sama internasional.

Kesehatan global setidaknya mencakup tiga isu utama, yang pertama yaitu pandemi, hal ini didasari atas meluasnya virus yang melampaui batas-batas negara. Kedua, perlu adanya kerja sama global guna menanggulangnya dan yang ketiga yaitu terciptanya rasa keadilan, artinya setiap negara di dunia harus memiliki akses yang sama terhadap isu kesehatan, khususnya pada masalah vaksin dan obat-obatan. Terlebih, kesehatan global dianggap sebagai *main issue* dalam domain kebijakan nasional. Mengingat, negara mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kesehatan rakyatnya.

Indonesia menjadi negara yang mempunyai peran besar dalam mewujudkan kerja sama di masa pandemi ini. Hal tersebut tentunya dapat dilihat dari bagaimana Indonesia mengembangkan hubungan kerja sama secara lebih luas lagi dalam sektor kesehatan. Upaya yang saat ini tengah dilakukan oleh Indonesia menjadi satu hal yang begitu penting. Mengingat, hadirnya pandemi Covid-19 pertama kali di Indonesia masih terdapat *missing link* dalam

Dipta Harizqi, 2022

ANALISIS STRATEGI DIPLOMASI VAKSIN MULTIJALUR INDONESIA DALAM UPAYA MENGATASI PANDEMI COVID-19 (2020-2021)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

penanganannya. Terlebih, Indonesia turut menjadi negara yang pernah tercatat sebagai negara yang mempunyai kasus Covid-19 terbanyak di dunia. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang turut aktif dalam melakukan serangkaian diplomasinya, terlihat dari adanya upaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam mewujudkan diplomasi dalam bidang kesehatan yang saat ini dikenal sebagai kebijakan diplomasi vaksin. Tujuan utama dari adanya diplomasi ini yaitu, untuk membuka akses lebih luas lagi dalam mendapatkan jaminan terhadap ketersediaan maupun jenis vaksin yang memang dibutuhkan oleh Indonesia. Dengan demikian, kebijakan ini juga menjadi sebuah *standing point* kerja sama yang dipelopori oleh Indonesia guna mengatasi berbagai permasalahan pandemi Covid-19.

Diplomasi vaksin yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini dilakukan melalui pendekatan bilateral maupun multilateral dan melibatkan semua aktor yang berkepentingan dengan tujuan utama guna membuka akses vaksin secara lebih luas lagi. Tentu, hal ini menjadi sebuah lampu hijau bagi pemerintah Indonesia dalam mendapatkan ketersediaan vaksin guna menjamin kesehatan bagi seluruh warga negaranya. Lebih lanjut, peran Indonesia dalam melakukan pendekatan terhadap permasalahan kesehatan global sejatinya sudah dilakukan sejak lama dengan mengedepankan politik luar negerinya dan membentuk *Global Health and Foreign Policy Initiative* (GHFPI) bersama dengan beberapa negara seperti Afrika Selatan, Brazil, Prancis, Norwegia, Senegal, dan Thailand pada September 2006 di kota New York.

GHFPI menghadirkan berbagai resolusi mengenai penyakit menular dan telah termaktub dalam resolusi majelis umum PBB, diantaranya No. 64/108 tahun 2009 yang menjelaskan tentang pengendalian *emerging infectious disease* hingga SDM kesehatan; resolusi No. 65/95 tahun 2010 berkaitan dengan pencapaian MDG's dan tata kelola global; resolusi No. 66/115 tahun 2011 tentang kesehatan, lingkungan hidup, hingga bencana alam; resolusi No. 67/81 tahun 2013 menjelaskan tentang *Universal Health Coverage*. Secara spesifik,

Dipta Harizqi, 2022

ANALISIS STRATEGI DIPLOMASI VAKSIN MULTIJALUR INDONESIA DALAM UPAYA MENGATASI PANDEMI COVID-19 (2020-2021)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

terdapat juga resolusi No. 68/98 tahun 2014 tentang bagaimana bentuk kemitraan global dalam aspek kesehatan. Sehingga dengan melihat adanya kondisi pandemi Covid-19, semua resolusi tersebut menjadi kebijakan yang nyata urgensinya (Laksono, 2018).

Saat ini Covid-19 telah melahirkan problematika besar bagi seluruh negara di dunia, khususnya terkait bagaimana upaya dalam menghentikan penyebarannya agar kemudian pandemi ini tidak semakin menjalar lebih luas lagi. Adanya situasi sosial dan ekonomi yang terdampak juga turut membuat banyak negara harus mencari jalan keluar terbaiknya, seperti halnya Indonesia yang di mana sejak awal pandemi ini berlangsung Indonesia secara konsisten selalu mengedepankan diplomasi vaksinnya dan menyuarakan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara di dunia. Lebih lanjut, Indonesia pun mendukung adanya penghapusan hak paten vaksin Covid-19 guna membantu mewujudkan kapasitas produksi vaksin. Tentunya, hal ini bertujuan untuk mewujudkan misi *global peace and prosperity* agar kemudian dapat menciptakan sebuah perdamaian dunia hingga kesejahteraan global, salah satu upayanya dengan mendapatkan perlindungan serta rasa aman dari berbagai ancaman yang datang melalui lintas batas negara.

Permasalahan Covid-19 telah mengakar menjadi sebuah ancaman yang serius. Terlebih, hal yang perlu ditekankan saat ini adalah bagaimana melihat objek permasalahan kesehatan bukan hanya sebatas cakupan negara saja, akan tetapi juga mengarah langsung kepada kehidupan manusia. Hal ini memiliki dampak yang kompleks, bahwa semakin banyak warga negara yang sakit maka akan mengganggu sistem atau roda perekonomian, serta hal ini juga dapat menyebabkan ketidakstabilan politik bagi sebuah negara. Hadirnya virus Covid-19 juga berdampak langsung pada roda perekonomian sebuah negara. Terlebih, pada negara yang tidak mempunyai kapasitas untuk mendapatkan akses kesehatan. Kemitraan global disini diuji untuk menyelesaikan permasalahan pandemi. Dalam hal ini pemerintah Indonesia melakukan

Dipta Harizqi, 2022

ANALISIS STRATEGI DIPLOMASI VAKSIN MULTIJALUR INDONESIA DALAM UPAYA MENGATASI PANDEMI COVID-19 (2020-2021)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pendekatan yang merujuk pada proyeksi kesehatan jangka panjang dan pengembangan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Oleh karena itu Indonesia sendiri telah memprakarsai diplomasi vaksin dengan melihat besarnya peluang dalam mengatasi berbagai permasalahan pandemi Covid-19.

Jauh sebelum adanya vaksin yang didistribusikan seperti saat ini, pemerintah Indonesia telah lebih dulu menginisiasi atau melakukan sebuah pendekatan bersama dengan beberapa negara untuk mengelola dan mengembangkan sejumlah vaksin guna mengatasi permasalahan pandemi Covid-19. Hal ini kemudian diwujudkan dengan adanya hubungan kerja sama yang intens bersama dengan sejumlah negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Inggris. Kemudian, upaya ini turut diikuti dengan adanya kebijakan diplomasi vaksin. Saat itu, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 99 Tahun 2020 mengenai pengadaan vaksin secara penuh untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi yang bertujuan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Umumnya, kerja sama yang saat ini dibangun oleh Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian Kesehatan dan *stakeholder* lainnya mempunyai tujuan guna memaksimalkan potensi kerja sama internasional untuk mencari berbagai sumber vaksin yang saat ini tengah dibutuhkan bagi 280 juta warga negara Indonesia.

Kebijakan diplomasi vaksin juga telah mendatangkan berbagai ketersediaan vaksin yang saat ini memang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia diantaranya seperti, Sinovac, Azstrazeneca, Pfizer, Sinopharm, hingga Moderna. Dalam pencarian pertama vaksin, pemerintah Indonesia menggiatkan kerja sama hubungan bilateral terhadap Tiongkok, adanya kesepakatan kerja sama antara Bio Farma dan Sinovac sejatinya menghasilkan 2 perjanjian sekaligus guna mendatangkan ketersediaan vaksin di Indonesia. Perjanjian pertama menyatakan bahwa akan dikirimkannya vaksin Sinovac sebanyak 40 juta dosis kepada pemerintah Indonesia pada periode November 2020 hingga Maret 2021, kemudian, pada perjanjian kedua dijelaskan bahwa

Dipta Harizqi, 2022

ANALISIS STRATEGI DIPLOMASI VAKSIN MULTIJALUR INDONESIA DALAM UPAYA MENGATASI PANDEMI COVID-19 (2020-2021)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

prioritas ketersediaan vaksin Sinovac untuk Bio Farma akan dikirimkan pada periode April hingga Desember 2021 (Setiawan, 2020).

Setelah kedatangan vaksin Sinovac, pemerintah Indonesia juga terus mencari peluang kerja sama melalui serangkaian diplomasi vaksinnya yang berfokus pada akses ketersediaan vaksin. Indonesia turut menggiatkan kerja sama melalui *Covid-19 Vaccines Global Access (COVAX) Facility* bersama, *Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI)*, *Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)* yang diinisiasikan oleh WHO, dan UNICEF. Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia nyatanya turut membuahkan hasil, setidaknya dalam kerja sama ini Indonesia sukses mendatangkan 11,7 juta dosis vaksin AstraZeneca dari Inggris pada Maret 2021, inisiatif seperti inilah yang saat ini tengah dilakukan oleh Indonesia dalam mewujudkan diplomasi vaksinnya.

Indonesia saat ini tengah menambah ketersediaan vaksin, hal ini dapat dilihat dari kedatangan vaksin Comirnaty yang diproduksi langsung oleh Pfizer and BioNTech pada Agustus 2021, vaksin ini juga telah menerima *emergency of use authorization (EUA)* oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga penilaian terhadap vaksin yang dikembangkan melalui tahapan mRNA dapat memenuhi standar internasional dan aman untuk digunakan. Pada tahap berikutnya, Indonesia telah menerima jenis vaksin baru yang dikembangkan langsung dari Tiongkok oleh Sinopharm China National Pharmaceutical Group. Proses kedatangan vaksin Sinopharm dibagi atas dua tahap yang pertama pada April 2021 sebanyak 482.400 dosis dan tahapan kedua berlangsung pada Mei dengan jumlah 500.000 dosis vaksin, kedua vaksin tersebut merupakan vaksin yang didatangkan dalam bentuk *vial* atau jadi. Vaksin jenis Sinopharm sejatinya telah menjalani uji klinis sebanyak 3 kali di Uni Emirat Arab dan menghasilkan efektivitas vaksin dengan presentase 78,02 persen, yang artinya dalam hal ini vaksin Sinopharm telah memenuhi standar uji kelayakan, sehingga vaksin ini dapat digunakan dengan aman.

Dipta Harizqi, 2022

ANALISIS STRATEGI DIPLOMASI VAKSIN MULTIJALUR INDONESIA DALAM UPAYA MENGATASI PANDEMI COVID-19 (2020-2021)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Pada Juli 2020, Indonesia kembali kedatangan bantuan vaksin Covid-19 melalui serangkaian hubungan kerja sama dengan Amerika Serikat. Indonesia mendapatkan 3.000.060 dosis vaksin pada tahap pertama dan pada tahap kedua sebanyak 1.500.100. Vaksin Moderna sendiri rupanya hampir sama dengan jenis vaksin Pfizer, yang dimana harus mendapatkan izin *emergency of use authorization* (EUA) lebih dulu sebelum nantinya dapat digunakan. Dengan kedatangan vaksin moderna, hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia selalu mengupayakan ketersediaan vaksin bagi kebutuhan dalam negerinya (Aditama, 2020). Lebih lanjut pemerintah Indonesia juga telah mengoptimalkan kerja sama vaksin ini agar nantinya dapat di distribusikan ke seluruh wilayah Indonesia untuk mengejar target 70% bahwa masyarakat Indonesia telah di vaksinasi pada akhir tahun 2021. Kedatangan berbagai vaksin yang ada di Indonesia menjadi bukti nyata bahwa pemerintah sangat serius guna membuka ruang diplomasi lebih luas lagi terhadap negara maupun *stakeholder* lainnya dalam mengamankan ketersediaan vaksin (Prakoso, 2020).

Keseriusan Indonesia dalam mendapatkan bantuan vaksin yang melimpah tentu didasari oleh alasan yang jelas. Organisasi kesehatan dunia atau *world health organization* (WHO) telah meminta kepada setiap negara bahwa untuk mencapai *herd immunity* vaksinasi harus dilakukan sebanyak tiga kali, dengan adanya penambahan untuk vaksinasi *booster*. Lantas, hal ini yang kemudian membuat setiap negara turut meningkatkan intensitas kerja samanya dalam mendapatkan banyak ketersediaan vaksin. Saat ini, Indonesia tengah menggencarkan kerja sama pengadaan vaksin yang bertujuan untuk menjamin seluruh masyarakatnya mendapatkan hak untuk di vaksinasi tanpa terkecuali. Hal ini selaras dengan tujuan pemerintah Indonesia yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk menjamin kesehatan bagi masyarakatnya di masa pandemi Covid-19.

Melihat upaya Indonesia dalam memenuhi kebutuhan vaksin, dapat dipahami bahwa pandemi Covid-19 menjadi sebuah kendala terhadap jalannya keamanan manusia atau *human security*. Menurut UNDP, konsep keamanan manusia sendiri adalah hak bagi setiap orang untuk hidup bebas guna menghindari berbagai ancaman kemiskinan hingga keputusasaan. Permasalahan kesehatan menjadi satu hal yang penting bagaimana pencapaian pembangunan sebuah negara juga harus selaras dengan konsep keamanan manusia. Terlebih, menurut Barry Buzan paradigma keamanan setidaknya telah bergeser mulai dari isu tradisional menjadi non-tradisional yang berkembang secara cepat dan multidimensional, serta mengedepankan konsep *people oriented* seperti dalam bidang ekonomi, sosial, hingga lingkungan yang di mana dalam kajian hubungan internasional hal ini tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, saat ini memang menjadi momentum yang tepat bagi banyak negara guna menata ulang jalannya kerja sama melalui serangkaian perbaikan dan peningkatan hubungan bilateral maupun multilateral, agar nantinya dapat menghasilkan suatu kebijakan yang komprehensif. Lebih lanjut, dengan adanya kerja sama internasional yang dilakukan secara optimal bukan tidak mungkin nantinya pandemi Covid-19 dapat segera teratasi dengan baik (Purbantina, 2020).

Literatur dalam tinjauan pustaka ini akan memuat pembahasan lebih jauh mengenai pandemi Covid-19 diantaranya, bagaimana dampak yang diakibatkan dari pandemi Covid-19, lalu seperti apa langkah atau strategi dalam menjalankan diplomasi kesehatan di masa pandemi, hingga apa strategi diplomasi kesehatan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk mengatasi pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yang ada saat ini sejatinya telah mempengaruhi tatanan global dengan melihat adanya dampak yang kemudian dihasilkan. Dalam penelitiannya, Kusno (2020) menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 yang ada saat ini membuat situasi semakin rumit, terlihat dari bagaimana banyak negara baik dalam lingkup regional maupun

global saling membuka kerja sama dan saling berkomunikasi dalam mengatasi berbagai permasalahan pandemi Covid-19. Adanya perekonomian global yang lesu justru membuat banyak negara turut merasakan jurang resesi, tidak terkecuali Indonesia. Rantai produksi yang ada bahkan bisa dikatakan terputus, sebab banyak negara kala itu lebih memilih untuk menerapkan kebijakan karantina wilayah (*lockdown*).

Situasi pandemi Covid-19 saat ini membuat banyak negara saling bergantung dalam menjalankan setiap aspek kerja samanya. Saat ini, masih banyak negara yang tentunya belum stabil dalam sektor kesehatan maupun ekonomi. Terlebih, Akbar (2021) juga menjelaskan bahwa hadirnya pandemi Covid-19 membuat banyak negara di dunia turut melakukan pertemuan atau forum kerja sama internasional yang berorientasikan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi secara berkelanjutan. Kerja sama yang didasari oleh aspek ketergantungan sejatinya merupakan hasil akan kemajuan teknologi, dan komunikasi yang dapat membantu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan hal ini mendorong banyak negara turut melakukannya (Syawfi, 2020).

Seiring membangun sebuah kerja sama internasional, perlu adanya sebuah evaluasi dari kebijakan yang telah dihasilkan, dengan menganalisis jalannya kerja sama hal ini menjadi suatu bentuk kepastian terciptanya eksistensi kerja sama yang telah dijalankan selama ini. Lebih lanjut, Djelantik (2020) juga menjelaskan bahwa aktor internasional diminta untuk tidak hanya sekedar membuat sebuah kebijakan saja, akan tetapi perlu adanya sebuah aksi nyata yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah langkah konkret dalam menangani permasalahan pandemi Covid-19. Terlebih, adanya pandemi Covid-19 saat ini telah dianggap sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC), hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 telah berubah menjadi sebuah bencana kemanusiaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tatanan kehidupan manusia, mulai dari aspek kesehatan hingga perekonomian.

Dipta Harizqi, 2022

ANALISIS STRATEGI DIPLOMASI VAKSIN MULTIJALUR INDONESIA DALAM UPAYA MENGATASI PANDEMI COVID-19 (2020-2021)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Menurut Ruckert (2016), adanya pandemi Covid-19 memaksa banyak negara untuk saling terbuka dan melakukan kerja sama guna mengatasi akibat yang dihasilkan oleh pandemi ini, salah satunya ialah melalui diplomasi kesehatan. Esensi dari adanya diplomasi kesehatan sendiri merujuk pada suatu instrumen atau kebijakan yang lebih mengarah pada tindakan ataupun praktiknya dalam menyelesaikan segala isu atau permasalahan kesehatan di dunia. Penelitian ini juga menempatkan bahwa kesehatan global harus mempunyai posisi tawar yang strategis dalam setiap agenda internasional, ini menjadi begitu penting ketika permasalahan kesehatan global sangat erat kaitannya dengan politik luar negeri sebuah negara. Terlebih, ketika merumuskan sebuah kebijakan terhadap permasalahan kesehatan global, bahwasannya setiap aktor juga harus turut andil dan diminta untuk mewujudkannya secara maksimal.

Dalam penelitiannya, Lestari (2021) menjelaskan bahwa adanya latar belakang budaya yang berbeda di setiap negara menjadi salah satu aspek penting bagaimana dalam penanganan pandemi Covid-19 sejatinya tidak dapat disamaratakan, berkaca dari banyaknya negara timur yang mempunyai budaya interaksi sosial cukup tinggi, sehingga hal ini membuat kasus penyebaran Covid-19 semakin meningkat setiap waktunya. Perlu adanya pemahaman bersama mengenai langkah dan strategi dalam menangani permasalahan pandemi Covid-19. Hadirnya pandemi Covid-19 juga semakin membuat peningkatan fokus dalam menjalankan diplomasi kesehatan yang didasarkan pada aspek pemahaman kapan suatu negara harus terlibat dalam kerja sama, Lebih lanjut, Fazal (2021) menjelaskan bahwa sektor kesehatan saat ini menjadi salah satu aspek penting dari perwujudan kepentingan nasional sebuah negara. Terlebih, hal ini juga harus diwujudkan dengan komitmen yang kuat sehingga dalam penanganan pandemi Covid-19 dapat menghasilkan output yang maksimal.

Diplomasi vaksin yang dikembangkan saat ini oleh pemerintah Indonesia sejatinya merujuk pada strategi dan penerapan dari diplomasi publik. Menurut Martha (2020), diplomasi publik ini dapat memiliki manfaat yang cukup besar dan tentunya dapat menjangkau berbagai aktor non-negara. Sehingga, hal ini dapat menciptakan komunikasi yang efektif dan terbuka dalam menyusun atau membuat sebuah kebijakan, dan ini juga membuat semakin tinggi rasa percaya diri dari semua aktor yang terlibat dalam menangani berbagai permasalahan pandemi Covid-19. Melalui penelitiannya, Wicaksana (2020) menjelaskan bahwa strategi pemerintah Indonesia dalam menjalankan diplomasi vaksinnnya juga terlihat dari posisi Indonesia yang tergabung dalam *Global Health and Foreign Policy Initiative* (GHFPI) dan telah mengeluarkan resolusi PBB mengenai penyakit menular, salah satu diantaranya menjelaskan mengenai *universal health coverage* yang termaktub dalam resolusi No. 67/81 tahun 2013.

Adanya jaminan kesehatan semesta (*universal health coverage*) setidaknya menciptakan ruang baru bagi pelayanan kesehatan di negara berkembang, yang resiko terkena wabah penyakitnya cukup besar. Ini merupakan bagian dari upaya diplomasi kesehatan yang diangkat kembali oleh pemerintah Indonesia agar negara-negara berkembang di seluruh dunia juga turut mendapatkan akses kesehatan yang adil dan merata, sehingga potensi kesenjangan dalam melihat permasalahan pandemi Covid-19 dapat segera teratasi (Adiyanta, 2020). Setidaknya terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung jalannya kebijakan *universal health coverage* antara lain seperti penguatan sistem kesehatan, menyiapkan alur pendanaan yang efektif agar tidak terjadinya kesulitan dalam permasalahan finansial, adanya akses kesehatan yang meliputi vaksin maupun obat-obatan juga menjadi hal yang utama dalam penanganan medis, hingga menyiapkan banyak tenaga kesehatan juga menjadi faktor esensial guna membantu pelayanan kesehatan publik di masa pandemi saat ini.

Tinjauan pustaka yang telah dianalisis sebelumnya terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang diajukan oleh penulis, dalam hal ini penulis lebih menganalisis strategi diplomasi vaksin yang saat ini tengah dijalankan oleh Indonesia dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19, sedangkan tinjauan pustaka yang telah dirangkum oleh penulis lebih memfokuskan pada penjelasan seperti apa dampak yang dihasilkan dari adanya pandemi Covid-19 hingga bagaimana diplomasi kesehatan global dapat menjadi sebuah kebijakan atau strategi dalam sektor kesehatan secara umum.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat banyaknya ragam permasalahan mengenai pandemi Covid-19 yang saat ini tengah melanda dunia, hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam penelitian. Terlebih, penelitian ini juga berfokus untuk menjelaskan bagaimana upaya diplomasi vaksin yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini, maka dalam penelitian ini penulis dapat merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut;

Bagaimana strategi diplomasi vaksin Indonesia dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu pertama, untuk menjelaskan bagaimana diplomasi vaksin dapat menjadi salah satu instrumen atau kebijakan yang tepat dalam menanggulangi permasalahan pandemi Covid-19. Kedua, penelitian ini turut mengidentifikasi strategi Indonesia dalam mewujudkan diplomasi vaksin yang saat ini tengah diimplementasikan sebagai sebuah kebijakan guna mengatasi permasalahan pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Praktis

Dipta Harizqi, 2022

ANALISIS STRATEGI DIPLOMASI VAKSIN MULTIJALUR INDONESIA DALAM UPAYA MENGATASI PANDEMI COVID-19 (2020-2021)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi setiap pemangku kepentingan, baik itu dari kementerian maupun lembaga terkait yang dalam hal ini berfokus dalam menangani permasalahan pandemi Covid-19, agar nantinya dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat untuk digunakan.

B. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat luas, terkait adanya permasalahan pandemi Covid-19 yang saat ini tengah menjadi isu sentral dan penelitian ini juga menjelaskan bagaimana peran pemerintah Indonesia, khususnya dalam mewujudkan diplomasi vaksin yang dilakukan hingga saat ini. Penulis berharap bahwasannya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi akademik yang nantinya banyak dilakukan oleh individu lain dalam melakukan sebuah riset atau penelitian di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri atas Latar Belakang Permasalahan yang menjadi dasar penelitian, dan terdapat berbagai rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, serta adanya tujuan, hingga manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua, terdapat tinjauan pustaka terkait berbagai penelitian terdahulu dengan topik yang selaras. Hal ini berfungsi sebagai bahan referensi penulis dalam penelitian yang dilakukan. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat landasan teori serta konsep yang menjadi landasan seorang penulis untuk menganalisis penelitian, hingga membantu terbentuknya alur pemikiran.

Dipta Harizqi, 2022

ANALISIS STRATEGI DIPLOMASI VAKSIN MULTIJALUR INDONESIA DALAM UPAYA MENGATASI PANDEMI COVID-19 (2020-2021)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

BAB III Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian atau metode kualitatif yang mengacu pada bahan tinjauan pustaka akademik, artikel dalam jurnal ilmiah yang dipublikasikan baik dari Indonesia maupun internasional dan pendukung data ilmiah lainnya.

BAB IV Diplomasi Vaksin Sebagai Kebijakan Dalam Menanggulangi Permasalahan Pandemi Covid-19

Bab ini berisi mengenai bagaimana diplomasi kesehatan global menjadi salah satu instrumen yang berpengaruh dan tepat digunakan dalam menanggulangi permasalahan pandemi Covid-19. Terlebih, diplomasi kesehatan global hadir sebagai sebuah bentuk kerja sama yang terbuka melalui antar-sektor maupun antar-aktor guna mendapatkan kebutuhan akan adanya akses kesehatan.

BAB V Analisis Pendekatan Multijalur Indonesia Dalam Mewujudkan Diplomasi Vaksin

Penulis menganalisis langkah dan strategi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan diplomasi kesehatan global melalui diplomasi vaksin yang bekerjasama dengan berbagai negara maupun *stakeholder* lainnya, langkah ini diambil oleh pemerintah Indonesia guna mendapatkan ketersediaan vaksin dan menjamin akses kesehatan bagi seluruh warga negaranya.

BAB VI Penutup

Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dan keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan saran yang nantinya dapat menjadi masukan terkait langkah atau strategi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan diplomasi vaksin sebagai bentuk peluang membangun kerja sama internasional.